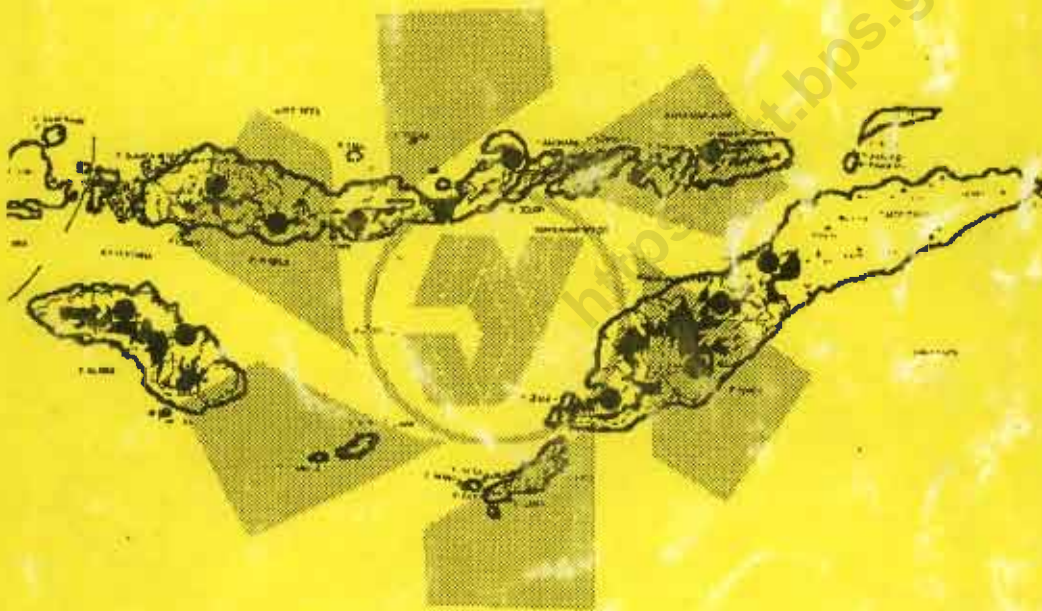




Katalog BPS : 9207.53

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN
1995 - 2000**



BPS Badan Pusat Statistik
Propinsi Nusa Tenggara Timur



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
NUSA TENGGARA TIMUR
MENURUT PENGGUNAAN
1995–2000**

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Tabel-Tabel Lampiran	vii
I. Pendahuluan	2
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan	3
1.3 Konsep dan Definisi	5
1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data	8
II. Tinjauan PDRB Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan	14
2.1 Komposisi Penggunaan PDRB	14
2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB	17
III. Perkembangan Peranan PDRB Sektoral	21
3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	21
3.2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	22
3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24
3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	26
3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto	28
Tabel-Tabel Lampiran	32-50
Daftar Pustaka	51

DAFTAR TABEL

Halaman

2.1	Komposisi Penggunaan PDRB NTT dan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku	15
2.2	Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT dan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993	18
3.1	Proporsi Konsumsi Rumah tangga Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kelompok Pengeluaran, Nusa Tenggara Timur	21
3.2	Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Kelompok Pengeluaran, Nusa Tenggara Timur	22
3.3	Proporsi Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Lembaga, Nusa Tenggara Timur	23
3.4	Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenis Lembaga, Nusa Tenggara Timur .	24
3.5	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenisnya, Nusa Tenggara Timur	25
3.6	Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenisnya, Nusa Tenggara Timur	26
3.7	Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang, Nusa Tenggara Timur	27
3.8	Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Asal Barang, Nusa Tenggara Timur	28
3.9	Neraca Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Berlaku, Nusa Tenggara Timur	29
3.10	Komposisi Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Berlaku, Nusa Tenggara Timur	30
3.11	Laju Pertumbuhan Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau Atas Dasar Harga Konstan 1993, Nusa Tenggara Timur	31

DAFTAR TABEL-TABEL LAMPIRAN

Halaman

1. Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur, Tahun 1995-2000	33
2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	34
3. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	35
4. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	36
5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	37
6. Konsumsi Rumah tangga Nusa Tenggara Timur, Tahun 1995-2000	38
7. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Nusa Tenggara Timur, Tahun 1995-2000	39
8. Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Tahun 1995-2000	40
9. Pembentukan Modal Tetap Bruto Nusa Tenggara Timur, Tahun 1995-2000 ...	41
10. Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur, Tahun 1995-2000	42
11. Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku, Tahun 1995-2000	43
12. Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1995-2000	44
13. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	45
14. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	46
15. Indeks Perkembangan Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	47
16. Indeks Perkembangan Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	48
17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	49
18. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan, Tahun 1995-2000	50

I. PENDAHULUAN

- ✓ *Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*
 - ✓ *PDRB Menurut Komponen Penggunaan*
 - ✓ *Konsep dan Definisi*
 - ✓ *Metode Penghitungan dan Sumber Data*

I. PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang umum digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya perekonomian suatu wilayah. Jika PDRB suatu wilayah semakin besar maka semakin besar pula sumber daya ekonomi di wilayah tersebut, begitu juga sebaliknya.

Untuk menghitung PDRB dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pengertian PDRB pada masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Pada pendekatan produksi**, PDRB didefinisikan sebagai jumlah dari semua nilai yang berhasil ditambahkan terhadap barang dan jasa melalui kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah (region) dalam periode waktu tertentu (umumnya satu triwulan atau satu tahun).
- b. **Pada pendekatan pendapatan**, PDRB adalah jumlah dari seluruh balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi oleh semua unit ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.
- c. **Pada pendekatan pengeluaran**, PDRB merupakan jumlah dari pengeluaran konsumen akhir atas barang dan jasa akhir di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Barang dan jasa akhir yang dimaksudkan dalam hal ini adalah barang dan jasa yang tidak digunakan sebagai input dalam suatu kegiatan produksi. Sedangkan konsumen akhir terdiri dari rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor (sebagai pengurang).

Hasil penghitungan PDRB berdasarkan ketiga pendekatan tersebut secara teori tidak akan berbeda satu sama lain. Namun demikian dalam prakteknya sering terdapat selisih atau diskrepansi statistik yang merupakan akibat dari kekurangakuratan data.

PDRB suatu wilayah pada umumnya dihitung dengan menggunakan dua sistem penilaian, yaitu:

- a. Penilaian **atas dasar harga berlaku**. Dalam sistem penilaian ini maka seluruh barang dan jasa yang dijadikan sebagai dasar penghitungan PDRB dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada periode penghitungan.

b. **Penilaian atas dasar harga konstan.** Dalam sistem ini maka barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung PDRB dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada periode tertentu yang dijadikan sebagai periode dasar. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dalam publikasi ini dilakukan dengan menggunakan harga tahun 1993 sebagai tahun dasar.

Hasil penghitungan PDRB dengan dua sistem penilaian tersebut memiliki kegunaan yang berbeda. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat ukuran atau skala perekonomian suatu wilayah, dan juga menjadi dasar untuk mengamati struktur perekonomian suatu wilayah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan lebih banyak digunakan untuk mengamati perkembangan tingkat produksi dari seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan juga merupakan data dasar yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

1.2 PDRB Menurut Komponen Penggunaan

Produk dari suatu kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan pemanfaatannya, yaitu **produk antara** dan **produk akhir**. Produk antara adalah produk dari suatu unit ekonomi yang digunakan sebagai input dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh unit ekonomi lain. Sedangkan produk akhir adalah produk yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi dan langsung digunakan atau dikonsumsi sebagaimana adanya, tanpa melalui kegiatan produksi lebih lanjut.

Seperti yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya, jumlah dari semua produk (barang dan jasa) akhir yang dikonsumsi oleh seluruh konsumen akhir (bukan untuk kepentingan produksi) di suatu wilayah akan sama dengan PDRB wilayah tersebut. PDRB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan inilah yang dikenal sebagai PDRB menurut komponen penggunaan.

Produk akhir dari suatu kegiatan ekonomi pada dasarnya memiliki dua kegunaan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan untuk investasi. Produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mencakup semua produk yang habis digunakan atau dikonsumsi selama periode penghitungan, dan tidak digunakan untuk menghasilkan produk lain. Dengan demikian, produk yang dikonsumsi secara ekonomi telah 'keluar' dari aktivitas produksi. Sementara produk yang digunakan untuk investasi mencakup semua barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam periode penghitungan dan secara otomatis akan menambah akumulasi 'kesejahteraan' wilayah.

Dengan menggunakan simbol Y untuk PDRB, C untuk konsumsi dan I untuk investasi, maka dapat dituliskan hubungan identitas:

$$Y = C + I$$

Dalam hubungan ini tersirat bahwa pendefinisian C dan I harus dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah telah benar-benar habis digunakan, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk kepentingan investasi.

Penggolongan permintaan terhadap produk akhir (disebut sebagai permintaan akhir) menjadi konsumsi dan investasi memang terasa sangat sederhana dan agregatif. Pada kenyataannya, baik konsumsi maupun investasi terdiri dari berbagai jenis pengeluaran.

Pengeluaran konsumsi secara umum dapat dibedakan menjadi konsumsi perorangan dan konsumsi publik. Konsumsi perorangan mencakup konsumsi yang dilakukan rumahtangga dan lembaga nirlaba (tidak mencari untung). Ciri dari konsumsi perorangan adalah (i) mencakup pengeluaran perorangan dalam kapasitas sebagai pribadi dan (ii) pengeluaran tersebut harus berupa barang dan jasa yang habis digunakan maksimal dalam satu tahun. Pengeluaran dari lembaga nirlaba dicakup sebagai komponen konsumsi karena pada kenyataannya lembaga atau institusi jenis ini memang tidak melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Sementara itu konsumsi publik mencakup pengeluaran konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi yang dicatat dalam hal ini hanyalah pengeluaran atas barang dan jasa yang habis digunakan pada tahun berjalan, sedangkan pengeluaran untuk membangun jalan dan sejenisnya dicakup dalam investasi.

Secara sederhana, pengeluaran untuk investasi akan mencakup semua jenis pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Pengeluaran investasi pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan level perekonomian, semisal peningkatan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan atau kepuasan di masa yang akan datang. Pengeluaran investasi pada dasarnya dapat dibedakan atas investasi domestik dan investasi luar wilayah. Investasi domestik terdiri dari pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok. Sedangkan investasi luar wilayah berupa ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan impor dan antar pulau masuk.

Dengan demikian hubungan identitas dalam perekonomian dapat digambarkan secara lebih rinci sebagai berikut:

$$Y = C_h + C_g + I_f + I_s + (X - M)$$

di mana $Y = \text{PDRB}$, $C_h = \text{konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba}$, $C_g = \text{konsumsi pemerintah}$, $I_f = \text{pembentukan modal tetap domestik bruto}$, $I_s = \text{perubahan stok}$, $X = \text{ekspor dan antar pulau keluar}$, dan $M = \text{impor dan antar pulau masuk}$.

Masing-masing peubah pada sisi sebelah kanan dari persamaan identitas tersebut pada hakekatnya merupakan komponen penggunaan dari PDRB suatu wilayah. Atau dengan kata lain jelas bahwa PDRB suatu wilayah dapat dirinci menurut penggunaannya, yaitu untuk konsumsi (rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah) dan investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, ekspor dan antar pulau keluar, dikurangi impor dan antar pulau masuk).

Penyusunan PDRB menurut komponen penggunaan memiliki peran yang cukup penting, terutama untuk melakukan analisis pola permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu entitas ekonomi. Melalui analisis ini dapat diketahui masing-masing proporsi PDRB yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau investasi. Jika proporsi konsumsi terlalu besar dapat diduga bahwa peningkatan kapasitas perekonomian di wilayah yang bersangkutan akan relatif berat, karena sumber daya yang digunakan untuk investasi akan mengecil. Dari analisis ini juga dapat diketahui seberapa besar 'kebocoran' yang harus diderita sebagai akibat dari besarnya barang dan jasa yang harus didatangkan dari luar wilayah untuk memenuhi permintaan yang ada. Bagi perencana pembangunan di bidang ekonomi informasi ini tentu saja dapat memperkaya masukan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil.

1.3 Konsep dan Definisi

Sesuai dengan uraian pada bagian terdahulu maka PDRB menurut penggunaan dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir, baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Dalam publikasi ini permintaan akhir dikelompokkan menjadi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor dan antar pulau keluar. Mengingat untuk memenuhi permintaan tersebut ada sebagian barang yang harus didatangkan dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur, maka jumlah dari seluruh komponen tersebut harus dikurangi dengan nilai impor barang dan antar pulau masuk.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam menghitung setiap komponen penggunaan tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa untuk tujuan konsumsi dan habis digunakan dalam periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto barang-barang bekas dan sisa. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran untuk bahan makanan, minuman, pakaian, bahan bakar dan jasa. Pembelian barang-barang yang tidak dapat direproduksi seperti hasil karya seni, barang-barang antik dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Selain itu pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup juga pembelian barang-barang modal yang dapat diraba seperti mobil, motor, furniture, radio dan lain-lain yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi. Namun demikian pembelian rumah tidak dicakup. Pengeluaran untuk sewa rumah dan perbaikannya, pengeluaran untuk rekening listrik, air, telepon dan lain-lain juga dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Begitu juga pengeluaran untuk pemakaian jasa dari pihak lain (jasa kesehatan, pendidikan, rekreasi/hiburan dan jasa lainnya) dicakup dalam pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dihitung berdasarkan konsep pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk (residen), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga yang menetap di suatu wilayah domestik ditambah dengan pembelian langsung oleh rumah tangga penduduk di luar wilayah, dikurangi dengan pengeluaran bukan penduduk yang dilakukan di wilayah yang bersangkutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi pembelian dan penerimaan transfer dalam bentuk barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak langsung neto yang dibayar oleh lembaga yang bersangkutan, dikurangi penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Lembaga swasta nirlaba adalah lembaga/ badan swasta yang dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Contoh lembaga swasta nirlaba adalah organisasi serikat buruh, persatuan para ahli, organisasi pelatih, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang khusus melayani masyarakat dan tidak menciptakan keuntungan untuk lembaga.

Unit usaha dari lembaga swasta ini bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Lembaga swasta nirlaba yang keuangan dan pengawasan sepenuhnya atau sebagian besar ditangani oleh pemerintah, merupakan bagian dari pengeluaran kegiatan pemerintah dan tidak dicakup dalam pengeluaran lembaga swasta nirlaba.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup semua jenis pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi

pemerintahan sipil dan pertahanan. Dalam hal ini pemerintah yang dimaksudkan terdiri dari departemen, lembaga non departemen dan lembaga pemerintah lainnya serta pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan pemerintah desa. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah seperti Perum, Perjan, Perseroan, PN dan sebagainya tidak dicakup di sini, karena kegiatan dari masing-masing badan usaha tersebut merupakan kegiatan produksi.

Pengeluaran konsumsi pemerintah antara lain terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang. Termasuk di dalamnya belanja perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin. Penerimaan dari hasil kegiatan produksi barang dan jasa tidak dicakup ke dalam pengeluaran konsumsi pemerintah.

d. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

Pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam wilayah dan pembelian barang modal baru dan bekas dari luar wilayah. Barang modal yang dimaksudkan adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi dan pada umumnya memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun.

Pembentukan modal tetap domestik bruto dapat berupa pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi atau dalam bentuk mesin dan alat perlengkapan lainnya. Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah dan cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta pengeluaran untuk perluasan areal pertambangan merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Penjualan neto dari barang-barang modal bekas dan barang-barang afkiran dari dalam daerah juga tidak termasuk dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang tersebut sudah dihitung sebagai barang modal pada waktu pertama kali dibeli. Pembelian atau pembuatan barang-barang tahan lama untuk keperluan perlengkapan militer seperti barang-barang untuk pertahanan, tank, alat-alat persenjataan, bangunan konstruksi dan barang-barang pertahanan lainnya tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto karena barang-barang konstruksi yang digunakan militer tersebut bersifat konsumtif dan diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah.

e. Perubahan Stok

Perubahan stok merupakan selisih antara stok pada akhir tahun dengan stok pada awal tahun. Stok yang dimaksudkan adalah barang jadi yang belum sempat

digunakan, barang setengah jadi dan barang-barang masih dalam proses penyelesaian, baik yang merupakan barang konsumsi maupun barang modal. Stok barang konsumsi dapat disimpan oleh rumahtangga, pedagang (di toko) atau oleh perusahaan. Begitu juga stok modal dapat disimpan oleh rumahtangga atau pelaku ekonomi lain.

Bangunan yang belum selesai tidak termasuk dalam stok tetapi dimasukkan ke dalam komponen pembentukan modal tetap. Stok barang pada pemerintah adalah barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan pada waktu kritis. Tanaman hutan dan tanaman keras yang belum diambil hasilnya tidak termasuk dalam stok, akan tetapi pemeliharaan ternak untuk dipotong dikategorikan sebagai stok.

f. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor merupakan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kegiatan ekspor dan impor dapat berupa ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, komunikasi, pariwisata dan jasa lainnya. Pembelian langsung oleh penduduk negara lain yang dilakukan di suatu negara dicatat sebagai ekspor dari negara tempat terjadinya transaksi. Sedangkan pembelian langsung oleh penduduk suatu negara yang dilakukan di luar negeri diperlakukan sebagai impor oleh negara yang bersangkutan.

g. Antar Pulau Keluar dan Masuk

Konsep antar pulau keluar dan antar pulau masuk sama dengan konsep untuk ekspor dan impor, hanya saja lingkup transaksinya terbatas pada antar daerah di suatu negara.

1.4 Metode Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan setiap komponen penggunaan dalam PDRB Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan data yang digunakan sebagai dasar penghitungan. Secara singkat metode penghitungan dan sumber datanya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Konsumsi Rumahtangga

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Sayangnya SUSENAS tidak diselenggarakan setiap tahun. Sehingga untuk tahun-tahun yang data SUSENAS-nya tidak tersedia, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga

terpaksa diestimasi menggunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pengeluaran konsumsi rumahtangga di Nusa Tenggara Timur idealnya harus mencakup pula konsumsi yang dilakukan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur di luar wilayah dikurangi dengan konsumsi penduduk asing (luar Nusa Tenggara Timur) yang dilakukan di wilayah ini. Namun demikian karena keterbatasan data, komponen ini belum dapat ditaksir. Sehingga dalam hal ini terpaksa digunakan asumsi bahwa konsumsi penduduk Nusa Tenggara Timur sama dengan konsumsi penduduk luar Nusa Tenggara Timur yang dilakukan di wilayah ini.

b. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Data dasar yang digunakan untuk menghitung pengeluaran lembaga swasta nirlaba adalah hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Namun demikian karena jumlah sampel dalam SKLNP relatif kecil, maka diperlukan penyesuaian berdasarkan hasil pengumpulan data lain seperti SKPR dan sejenisnya.

Penghitungan pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba dilakukan dengan menjumlahkan perkiraan biaya antara dari setiap lembaga nirlaba yang ada di Nusa Tenggara Timur.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Sumber data yang digunakan untuk menghitung pengeluaran konsumsi pemerintah adalah realisasi belanja rutin dan pembangunan baik dari APBN maupun APBD. Jadi dalam hal ini mencakup realisasi pengeluaran pemerintah pusat yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dan realisasi pengeluaran pemerintah daerah tingkat I, II dan pemerintahan desa.

Karena laporan realisasi keuangan selalu dalam tahun anggaran maka untuk mendapatkan angka menurut tahun kalender ditaksir dengan membagi data tahun anggaran ke dalam 4 triwulan, kemudian secara proporsional diperoleh data tahun kalender dengan cara menjumlahkan $\frac{1}{4}$ bagian dari data tahun anggaran sebelumnya dengan $\frac{3}{4}$ dari tahun anggaran yang bersangkutan.

Selanjutnya nilai pengeluaran konsumsi pemerintah Nusa Tenggara Timur diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, biaya perbaikan ringan dan pengeluaran rutin yang lain dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Hankam. Juga termasuk disini adalah belanja pegawai dan belanja bahan dari belanja pembangunan.

Untuk memperoleh nilai pengeluaran pemerintah pada masing-masing komponen dilakukan sebagai berikut:

(i). Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja pegawai dari belanja rutin yang terdiri dari upah gaji, tunjangan beras maupun uang, pakaian dinas dan lain-lain belanja pegawai baik Daerah, Pusat maupun Hankam.
- Belanja pegawai yang berasal dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek-proyek APBN.

(ii). Belanja Barang mencakup:

- Belanja barang dari belanja rutin (tidak termasuk belanja barang modal)
- Belanja barang dari belanja pembangunan diolah dari laporan realisasi keuangan proyek APBD dan proyek APBN.

(iii). Biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin; seperti biaya perbaikan/pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan sebagainya.

(iv). Belanja rutin lainnya; seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

(v). Penyusutan barang modal.

Data realisasi pengeluaran keuangan Daerah Tingkat I, II dan Desa diperoleh dari laporan realisasi keuangan daerah masing-masing tingkat (K1, K2 dan K3).

Data mengenai realisasi anggaran rutin pemerintah pusat diperoleh dari setiap instansi jawatan tingkat Propinsi yang meliputi data belanja pegawai, belanja barang dan biaya pemeliharaan, sedang belanja pegawai dan belanja barang yang berasal dari belanja pembangunan berasal dari BAPPEDA Tingkat I yang meliputi data belanja pembangunan sektoral (dari APBN), Inpres SD, Inpres Desa (Bangdes), Inpres Kesehatan, Inpres Tingkat II, Inpres Pasar dan belanja pembangunan daerah yang bersumber dari Biro Pembangunan Setwilda Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Data belanja pertahanan dan keamanan diperoleh dari masing-masing kesatuan militer di kabupaten dan propinsi (KOREM, DANSIONAL, DANLANUD, KOWIL, KEPOLISIAN), yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang.

Nilai pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan menjumlahkan nilai belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan dan belanja rutin lainnya dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Hankam.

Sedangkan nilai konsumsi atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan mendeflasikan nilai atas dasar harga yang berlaku dengan Indeks Umum Harga Konsumen kota Kupang untuk belanja pegawai dan biaya perjalanan serta Indeks

Umum HPB tanpa ekspor untuk belanja barang, biaya perbaikan ringan dan pemeliharaan rutin dan biaya rutin lainnya.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Cara yang digunakan dalam menaksir nilai pembentukan modal tetap bruto Nusa Tenggara Timur adalah dengan pendekatan arus komoditi, yaitu menghitung nilai barang modal baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan modal tetap bruto hasil produksi lokal ditaksir dari nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri dan sektor konstruksi serta pembentukan modal tetap bruto yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur (melalui impor dan antar pulau masuk), ditaksir melalui arus barang-barang modal yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur melalui impor dari luar negeri dan antar pulau masuk (hasil pengolahan BPP laut di pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di Nusa Tenggara Timur).

Sektor Industri

Barang-barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri antara lain dihasilkan oleh industri galangan perahu layar/perahu motor, meubel dan alat-alat pertanian. Nilai barang modal diperoleh dari perhitungan PDRB sektoral, baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan 1993.

Sektor Konstruksi

Nilai barang modal yang dihasilkan oleh sektor bangunan ditaksir dengan menggunakan rasio barang modal terhadap total nilai output sektor konstruksi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993.

Sektor Pemerintahan

Nilai pembentukan modal tetap bruto oleh sektor pemerintahan antara lain terdiri dari biaya reboisasi dan penghijauan, pengadaan ternak bibit, sapi perah dan lain-lain yang diperoleh dari pengolahan realisasi belanja pembangunan (APBD dan APBN).

Sebenarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya mencakup pula biaya konstruksi dan industri, akan tetapi mengingat komponen ini sudah dihitung pada sektornya maka tidak dihitung lagi di sini.

Nilai atas dasar harga konstan 1993 ditaksir dengan cara mendeflasikan nilai pembentukan barang modal atas dasar harga berlaku dengan menggunakan Indeks Umum HPB tanpa ekspor.

Impor dan Antar Pulau Masuk

Pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari impor dan antar pulau masuk pada dasarnya merupakan barang modal yang dihasilkan oleh sektor industri di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Barang modal ini antara lain berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan berat dan sebagainya.

Nilai barang-barang modal atas dasar harga konstan 1993 dari luar wilayah tersebut ditaksir dengan cara revaluasi.

e. Ekspor dan Antar Pulau Neto

Untuk menaksir besarnya nilai ekspor neto Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai ekspor dan antar pulau keluar dikurangi dengan nilai impor dan nilai antar pulau masuk. Datanya diperoleh dari Kanwil Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik.

Nilai atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara revaluasi.

f. Perubahan Stok

Perubahan stok pada dasarnya adalah perubahan persediaan barang-barang yang berasal dari pembelian (baik untuk keperluan produksi suatu kegiatan ekonomi maupun untuk dijual lagi), dan barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum terjual (baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi).

Pemegang stok terdiri dari produsen, pedagang dan pemerintah. Stok yang dikuasai oleh pemerintah mencakup barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan khusus (misalnya untuk mengatasi krisis dan sejenisnya).

Alat-alat berat seperti kapal dan lain-lain yang sedang dalam proses pengerjaan merupakan stok yang dikuasai oleh produsen. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan tidak termasuk stok akan tetapi menjadi bagian dari pembentukan modal tetap bruto.

Mengingat keterbatasan data maka nilai perubahan stok dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan diperlakukan sebagai sisaan (residual) dari PDRB sektoral setelah dikurangi komponen-komponen penggunaan lainnya.

II. TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

- ✓ *Komposisi Penggunaan PDRB*
- ✓ *Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB*

II. TINJAUAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT PENGGUNAAN

Sesuai dengan uraian terdahulu, PDRB dari sisi penggunaan akan mencakup seluruh produk akhir yang digunakan atau dikonsumsi oleh para konsumen akhir. Dengan kata lain PDRB dapat pula dipandang sebagai seluruh produk akhir yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir.

Permintaan akhir, yaitu permintaan yang bukan untuk keperluan produksi, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu permintaan akhir domestik dan permintaan akhir dari luar wilayah. Permintaan akhir domestik terdiri dari konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto. Sedangkan permintaan akhir dari luar wilayah terdiri dari ekspor (dari luar negeri) dan antar pulau keluar (dari wilayah lain di dalam negeri). Pada prakteknya, penyediaan produk akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu wilayah seringkali tidak mampu memenuhi seluruh permintaan akhir yang ada. Dalam hal ini maka perlu didatangkan produk akhir dari luar wilayah, yang terdiri dari impor dan antar pulau masuk.

Uraian berikut akan mengamati komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dan perkembangannya.

2.1 Komposisi Penggunaan PDRB

Komposisi penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun 1997 sampai 2000 relatif tidak mengalami perubahan. Hal yang sama juga terjadi dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa proporsi terbesar penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur dalam kurun 1997 sampai dengan 2000 adalah untuk memenuhi konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba. Pada tahun 1997 konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba di Nusa Tenggara Timur baru mencapai 55,19 persen dari seluruh PDRB, kemudian meningkat tajam menjadi 67,86 persen pada tahun 1998. Peningkatan pada tahun 1998 ini sangat mudah dipahami, mengingat pada tahun ini krisis ekonomi terus berlangsung sepanjang tahun. Pada tahun ini pula perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, sementara konsumsi rumah tangga yang merupakan cerminan dari pemenuhan kebutuhan pokok relatif konstan, sehingga proporsinya langsung membengkak. Peningkatan proporsi konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta

nirlaba terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur juga terjadi pada dua tahun berikutnya. Proporsi konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba pada tahun 1999 adalah sebesar 74,57 persen dan menjadi 78,46 persen pada tahun 2000. Tingginya proporsi kemungkinan besar sebagai dampak dari banyaknya pengungsi yang tinggal di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun belakangan ini.

Tabel 2.1
Komposisi Penggunaan PDRB NTT dan PDB Indonesia
Atas Dasar Harga Berlaku

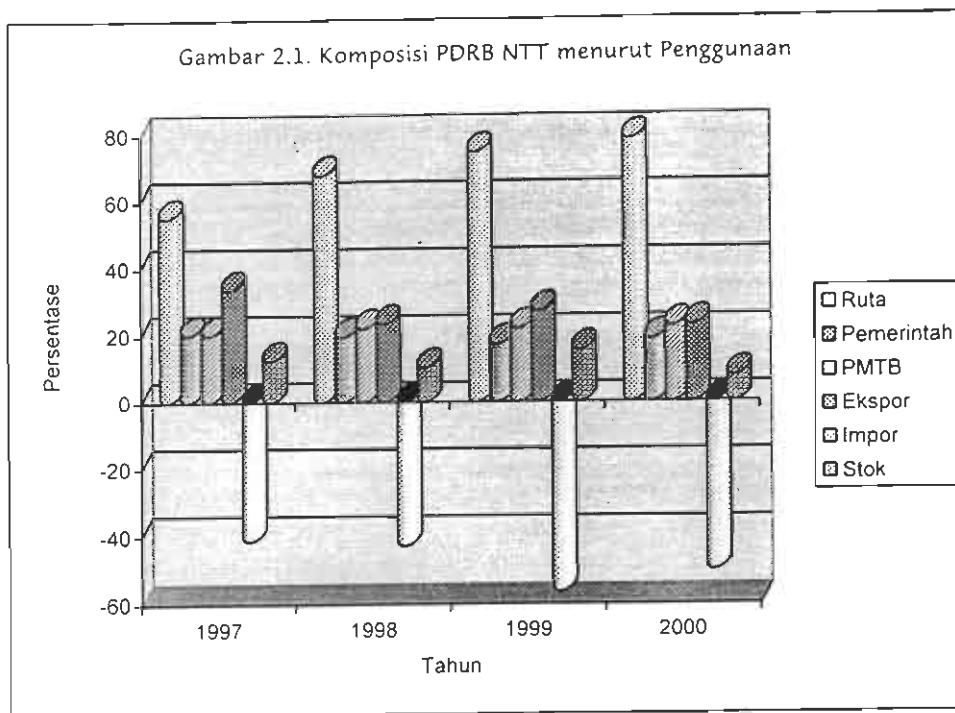
(Persen)

Rincian	NTT				Indonesia			
	1997	1998	1999 ^{e)}	2000 ^{f)}	1997	1998	1999 ^{e)}	2000 ^{f)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	55,19	67,86	74,57	78,46	61,68	67,78	73,26	67,25
2. Konsumsi Pemerintah	20,13	19,44	17,30	18,70	6,84	5,69	6,54	7,03
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	20,02	21,92	21,92	22,43	28,31	25,43	21,65	24,32
4. Ekspor ^{b)}	33,58	23,27	27,05	22,90	27,86	52,97	35,19	38,55
5. Impor ^{c)} (-)	41,39	42,80	56,30	50,11	28,13	43,22	27,18	30,70
6. Perubahan Stok ^{d)}	12,47	10,30	15,46	7,62	3,44	-8,65	-9,47	-6,46
PDRB atau PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan.

- a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
- b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar
- c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk
- d) Sisaan (residual)
- e) Angka revisi
- f) Angka sementara

Penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi permintaan ekspor dan antar pulau keluar proporsinya merupakan kedua terbesar, walaupun perkembangannya menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 1997, ekspor dan antar pulau keluar mencapai 33,58 persen dari nilai PDRB Nusa Tenggara Timur. Proporsi tersebut menurun menjadi 23,27 persen pada tahun 1998, kemudian meningkat menjadi 27,05 persen pada tahun 1999. Permintaan ekspor dan antar pulau keluar kondisinya kembali memburuk pada tahun 2000, dan proporsinya menjadi hanya 22,90 persen terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur.



Pada tahun 1997 proporsi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, yaitu sekitar 20,13 persen. Pada tahun 1998 proporsi tersebut sedikit meningkat menjadi 21,92 persen. Dua tahun berikutnya proporsi pembentukan modal tetap bruto tersebut sedikit meningkat menjadi 22,43 persen pada tahun 2000.

Sementara itu konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah di Nusa Tenggara Timur proporsinya merupakan yang terkecil. Pada tahun 1997 konsumsi pemerintah mencapai 20,13 persen dari PDRB Nusa Tenggara Timur. Proporsi tersebut terus menurun secara lambat selama dua tahun berikutnya hingga menjadi hanya 17,36 persen pada tahun 1999. Kemudian sedikit meningkat menjadi 18,70 persen pada tahun 2000.

Perekonomian Nusa Tenggara Timur agaknya masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari proporsi impor dan antar pulau masuk dalam kurun 1997-2000. Pada tahun 1997 proporsi impor dan antar pulau masuk baru mencapai 41,39 persen dari total PDRB Nusa Tenggara Timur. Setelah merayap pelan menjadi 42,80 persen pada tahun 1998, kemudian melonjak tajam menjadi 56,30 persen pada tahun 1999. Angka terakhir ini menunjukkan bahwa sekitar 56,30 persen produk yang digunakan untuk memenuhi permintaan para konsumen akhir di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1999 terpaksa harus didatangkan melalui impor dan antar pulau masuk. Tingginya proporsi impor dalam perekonomian ini cukup mengkhawatirkan karena merupakan cerminan dari tingginya pengaruh 'luar' dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur. Namun

demikian khusus lonjakan tahun 1999 barangkali lebih merupakan akibat dari mengalirnya pengungsi ke wilayah ini, dan bukan semata-mata karena kebutuhan real perekonomian 'normal' Nusa Tenggara Timur. Dugaan terakhir ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada tahun yang sama proporsi konsumsi rumahtangga meningkat tajam, sehingga mendorong lonjakan impor untuk memenuhinya. Pada tahun 2000 proporsi impor menurun menjadi hanya 50,11 persen.

Pola penggunaan PDRB Nusa Tenggara Timur tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pola penggunaan PDB pada level nasional. Konsumsi rumahtangga dan ekspor memiliki proporsi yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Hanya saja proporsi konsumsi pemerintah dan impor dalam perekonomian Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan proporsi kedua komponen tersebut dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

2.2 Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB

Walaupun pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba merupakan proporsi terbesar dalam PDRB Nusa Tenggara Timur, namun dalam kurun 1997-2000 ternyata sempat mengalami laju pertumbuhan negatif (lihat Tabel 2.2). Pada tahun 1997 pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba menurun pada dua tahun berikutnya, yaitu masing-masing sebesar minus 7,75 persen dan menurun lagi sebesar minus 1,20 persen pada tahun 1998. Namun demikian pada dua tahun berikutnya pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba kembali meningkat dan mengalami pertumbuhan sebesar 14,12 persen pada tahun 1999 dan 6,59 persen pada tahun 2000.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan satu-satunya komponen yang tidak pernah mengalami pertumbuhan negatif dalam periode 1997-2000. Laju pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 1997 adalah sebesar 5,98 persen, kemudian menurun menjadi 4,98 persen tahun 1998. Sama halnya dengan konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 1999 juga mengalami peningkatan tajam, yaitu tumbuh sebesar 14,05 persen. Namun laju pertumbuhannya pada tahun 2000 hanya sebesar 5,15 persen.

Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur masih belum menggembirakan. Pada tahun 1997 laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto adalah minus 11,22 persen, dan menjadi semakin parah dengan pertumbuhan minus 17,38 persen pada tahun 1998. Sementara laju pertumbuhan pada tahun 1999 hanya sebesar 0,44 persen dan meningkat tajam menjadi 7,62 persen pada tahun 2000. Gambaran sepintas ini memperlihatkan bahwa

peningkatan kapasitas produksi yang dicerminkan oleh pembentukan modal tetap bruto (yang antara lain berupa pembelian baru untuk mesin atau barang modal lainnya) masih menghadapi masalah cukup serius dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Komponen Penggunaan PDRB NTT dan PDB Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 1993

(Persen)

Rincian	NTT				Indonesia			
	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{e)}	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{e)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga ^{a)}	-7,75	-1,20	14,12	6,59	7,82	-6,17	4,63	3,63
2. Konsumsi Pemerintah	5,98	4,98	14,05	5,15	0,06	-15,37	0,69	6,49
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-11,22	-17,38	0,44	7,62	8,57	-33,01	-19,38	17,91
4. Ekspor ^{b)}	33,24	-24,22	36,69	-26,78	7,80	11,18	-31,61	16,06
5. Impor ^{c)} (-)	12,18	-23,51	33,77	-8,57	14,72	-5,29	-40,68	18,18
PDRB atau PDB	5,62	-2,73	2,73	3,98	4,70	-13,13	0,85	4,77

Keterangan:

- a) Termasuk pengeluaran konsumsi lembaga swasta nir laba
- b) Untuk NTT termasuk antar pulau keluar
- c) Untuk NTT termasuk antar pulau masuk
- d) Angka revisi
- e) Angka sementara

Ekspor dan antar pulau keluar Nusa Tenggara Timur pada tahun 1997 menikmati laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 33,24 persen. Namun pada tahun 1998 ekspor dan antar pulau keluar mengalami laju pertumbuhan negatif sebesar minus 24,22 persen. Ketika perekonomian Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan mengalami perbaikan pada tahun 1999, ekspor dan antar pulau keluar pun kondisinya ikut membaik, bahkan mengalami laju pertumbuhan yang tinggi, yaitu 36,69 persen. Sayangnya laju pertumbuhan tersebut kembali menjadi negatif sebesar minus 26,78 persen pada tahun 2000.

Pola pertumbuhan impor dan antar pulau masuk ternyata hampir sama dengan pola pertumbuhan ekspor dan antar pulau keluar. Pada tahun 1997 barang yang diimpor dan antar pulau ke Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 12,18 persen. Seiring dengan terpuruknya perekonomian Nusa Tenggara Timur pada

III. PERKEMBANGAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga*
- ✓ *Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba*
 - ✓ *Pengeluaran Konsumsi Pemerintah*
 - ✓ *Pembentukan Modal Tetap Bruto*
 - ✓ *Ekspor dan Antar Pulau Neto*

III. PERKEMBANGAN KOMPONEN PENGUNAAN PDRB NUSA TENGGARA TIMUR

Ulasan pada bab ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan setiap komponen penggunaan PDRB secara lebih rinci. Pembahasan akan mencakup dari sisi komposisi (proporsi) dan pertumbuhannya

3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumahtangga yang dimaksudkan di sini hanyalah konsumsi rumahtangga saja, tanpa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh lembaga swasta nirlaba.

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar pengeluaran konsumsi rumahtangga di Nusa Tenggara Timur adalah untuk membayar pengeluaran kelompok makanan. Pada tahun 1997 pengeluaran untuk kelompok makanan ini mencapai 76,26 persen. Pada saat krisis berlangsung sepanjang tahun 1998 proporsi konsumsi makanan menjadi semakin besar lagi, yaitu 80,58 persen. Sedangkan pada tahun 1999 proporsi pengeluaran rumahtangga untuk kelompok makanan menurun tajam menjadi hanya 70,30 persen dan sedikit meningkat menjadi 72,01 persen pada tahun 2000.

Tabel 3.1
Proporsi Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kelompok Pengeluaran
Nusa Tenggara Timur

Jenis Pengeluaran	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kelompok Makanan	76,26	80,58	70,30	72,01
2. Kelompok Bukan Makanan	23,74	19,42	29,70	27,99
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>(Juta Rupiah)</i>	2.234.249	3.282.832	4.168.034	4.941.682

Keterangan: ^{a)} Angka revisi
^{b)} Angka sementara

Tabel 3.3
Proporsi Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Lembaga
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Lembaga	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Keagamaan	96,40	96,48	96,41	96,41
2. Lembaga Sosial Lainnya	3,60	3,52	3,59	3,59
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>(Juta Rupiah)</i>	19.228	20.667	21.169	23.990

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara

Jika diperhatikan laju pertumbuhannya, tampak bahwa pengeluaran konsumsi lembaga keagamaan memiliki pola perkembangan yang berbeda dengan pengeluaran konsumsi lembaga sosial lainnya. Pada tahun 1997 pengeluaran konsumsi lembaga keagamaan mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen, kemudian menurun sebesar minus 1,28 persen pada tahun 1998 (lihat Tabel 3.4). Pada tahun 1999 pengeluaran konsumsi oleh lembaga meningkat sebesar 0,90 persen dan meningkat lagi menjadi 3,00 persen pada tahun 2000. Sementara itu pengeluaran konsumsi lembaga sosial lainnya terus mengalami pertumbuhan positif sepanjang periode 1997-2000. Laju pertumbuhan tertinggi justru terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 5,68 persen.



Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenis Lembaga
Nusa Tenggara Timur

Jenis Lembaga	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lembaga Keagamaan	1,59	-1,28	0,90	3,00
2. Lembaga Sosial Lainnya	0,17	5,68	1,66	3,00
JUMLAH	1,54	-1,01	0,93	3,00

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara

3.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Proporsi terbesar pengeluaran konsumsi pemerintah di Nusa Tenggara Timur pada periode 1997-2000 adalah untuk belanja pegawai bruto, yaitu belanja pegawai sebelum dipotong pajak dan berbagai potongan lainnya (lihat Tabel 3.5). Pada tahun 1997 proporsi belanja pegawai bruto terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 81,38 persen dan secara sangat lambat menurun hingga akhirnya hanya sebesar 80,58 persen pada tahun 1999. Pada tahun 2000 proporsi belanja pegawai kembali meningkat menjadi 81,37 persen.

Proporsi kedua terbesar dari pengeluaran konsumsi pemerintah adalah untuk belanja barang, yaitu berkisar antara 8,65 persen sampai dengan 8,81 persen dalam kurun 1997-2000. Urutan berikutnya adalah untuk belanja rutin lainnya, yang proporsinya berkisar antara 3,78 sampai dengan 4,99 persen dalam kurun yang sama. Proporsi pengeluaran pemerintah untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin pada periode 1997-2000 berada pada kisaran 2,68 sampai dengan 2,96 persen. Sedangkan proporsi untuk biaya perjalanan dinas berkisar antara 2,22 sampai dengan 3,14 persen terhadap total pengeluaran konsumsi pemerintah dalam periode 1997-2000.

Tabel 3.5
Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenisnya
Nusa Tenggara Timur

<i>(Persen)</i>				
Jenis Pengeluaran	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	81,38	80,69	80,58	81,37
2. Belanja Barang	8,74	8,72	8,65	8,81
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	2,96	2,95	2,96	2,68
4. Biaya Perjalanan Dinas	3,14	2,88	2,82	2,22
5. Belanja Rutin Lainnya	3,78	4,76	4,99	4,92
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>(Juta Rupiah)</i>	<i>821.900</i>	<i>946.373</i>	<i>971.708</i>	<i>1.183.686</i>

Keterangan. a) Angka revisi
b) Angka sementara

Hampir semua jenis pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami peningkatan dalam kurun 1997-2000, kecuali pengeluaran untuk perjalanan dinas yang menurun pada tahun 1998 dan 2000 serta pengeluaran biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin yang mengalami penurunan pada tahun 2000 (lihat Tabel 3.6). Pengeluaran untuk belanja rutin lainnya memperlihatkan fenomena yang cukup menarik. Pada tahun 1998 hampir semua komponen pengeluaran hanya mengalami peningkatan yang relatif kecil, bahkan perjalanan dinas mengalami penurunan, namun pengeluaran untuk belanja rutin lainnya justru meningkat tajam, yaitu sebesar 30,08 persen. Kemungkinan besar meningkatnya belanja rutin ini adalah untuk membantu berbagai kondisi darurat di masyarakat yang memang banyak terjadi pada tahun itu.

Tabel 3.6
Laju Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Atas dasar Harga Konstan 1993 Menurut Jenisnya
Nusa Tenggara Timur

(Persen)

Jenis Pengeluaran	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Belanja Pegawai Bruto	3,97	4,50	13,89	6,17
2. Belanja Barang	15,20	2,91	13,13	7,13
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	5,91	3,02	14,22	-4,81
4. Biaya Perjalanan Dinas	25,10	-5,50	11,85	-17,11
5. Belanja Rutin Lainnya	17,37	30,08	19,63	3,68
JUMLAH	5,98	4,98	14,05	5,15

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara

3.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto di Nusa Tenggara Timur dalam kurun 1997-2000 ternyata didominasi oleh barang modal domestik (lihat Tabel 3.7). Namun demikian hal ini harus dilihat lebih cermat lagi. Sebagian besar pembentukan modal tetap bruto domestik pada kurun 1997-2000 tersebut ternyata berupa output dari sektor konstruksi yang antara lain berupa bangunan. Dengan demikian kandungan lokal dari pembentukan modal tetap bruto ini sebagian besar adalah berupa bangunan, yang peranannya terhadap peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian kurang terlalu besar.

Sementara itu proporsi pembentukan modal untuk peningkatan kapasitas produksi agaknya belum terlalu besar. Hal ini ditunjukkan oleh masih relatif kecilnya proporsi pembentukan modal dari impor dan antar pulau masuk dan dari sektor industri domestik. Proporsi pembentukan modal ini dalam kurun 1997-2000 masih kurang dari 15 persen.

Tabel 3.7
Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Asal Barang
Nusa Tenggara Timur

Asal Barang	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	7,89	13,89	14,85	12,96
2. Domestik	92,11	86,11	85,15	87,04
a. Industri	1,07	0,88	0,84	0,75
b. Konstruksi	89,44	84,04	83,25	84,84
c. Pemerintah*)	1,61	1,18	1,06	1,45
JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00
(Juta Rupiah)	817.497	1.067.057	1.231.647	1.419.788

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara

Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap menurut asal barang adalah seperti yang disajikan pada Tabel 3.8. Pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari impor dan antar pulau masuk pada tahun 1997 mengalami penurunan sebesar minus 57,56 persen. Pada tahun 1998 pembentukan modal tetap bruto dari impor dan antar pulau masuk kembali meningkat sebesar 20,03 persen dan meningkat lagi sebesar 24,84 persen pada tahun 1999. Laju tersebut menurun tajam menjadi hanya 1,82 persen pada tahun 2000. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto yang berasal dari sektor-sektor produksi domestik pada tahun 1997 tumbuh negatif sebesar minus 3,16 persen. Penurunan terus terjadi pada dua tahun berikutnya, yaitu minus 20,23 persen pada tahun 1998 dan minus 1,42 persen pada tahun 1999. Penurunan tajam pembentukan modal dari barang domestik pada tahun 1998 tersebut terutama disebabkan oleh terganggunya kegiatan konstruksi. Pada tahun 2000 pembentukan modal tetap bruto domestik mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang cukup besar menjadi 8,53 persen.

Tabel 3.8
Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Asal Barang
Nusa Tenggara Timur

Asal Barang	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	-57,56	20,03	24,84	1,82
2. Domestik	-3,16	-20,23	-1,42	8,53
a. Industri	22,29	0,78	-16,89	56,55
b. Konstruksi	-3,45	-20,59	-1,46	6,80
c. Pemerintah*)	0,46	-13,11	11,69	60,12
JUMLAH	-11,22	-17,38	0,44	7,62

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara

3.5 Ekspor dan Antar Pulau Neto

Nilai ekspor dan antar pulau keluar dari Nusa Tenggara Timur pada tahun 1997 mencapai nilai sekitar 1.371 milyar rupiah. (lihat Tabel 3.9). Pada tahun 1998 nilai tersebut sedikit menurun menjadi hanya sekitar 1.133 milyar rupiah, tetapi meningkat lagi menjadi sekitar 1.519 milyar rupiah pada tahun 1999. Sayangnya pada tahun 2000 nilai ekspor sedikit menurun menjadi hanya sekitar 1.450 milyar rupiah. Walaupun nilai ekspor dan antar pulau keluar tersebut relatif tinggi, namun nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur ternyata jauh lebih tinggi lagi. Pada tahun 1997 nilai impor dan antar pulau masuk ke Nusa Tenggara Timur mencapai 1.690 milyar rupiah, dan terus meningkat hingga menjadi 3.172 milyar rupiah pada tahun 2000. Peningkatan impor dan antar pulau masuk tahun 1999 sangat tinggi dibandingkan dengan nilai impor dan antar pulau masuk pada tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan besar merupakan dampak dari meningkatnya berbagai kebutuhan yang harus disediakan terutama untuk keperluan pengungsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan neraca perdagangan luar negeri dan antar pulau di Nusa Tenggara Timur terus menanggung defisit dalam kurun 1997-2000, bahkan tingkatnya cenderung semakin besar dalam dua tahun terakhir. Besarnya defisit pada tahun 1997 mencapai 319 milyar rupiah. Pada tahun 1998 defisit neraca

perdagangan tersebut langsung membengkak menjadi 951 milyar rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 1.722 pada tahun 2000.

Tabel 3.9
Neraca Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Berlaku
Nusa Tenggara Timur

<i>(Juta Rupiah)</i>				
Rincian	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	1.371.239	1.132.808	1.519.377	1.449.725
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	1.689.982	2.083.328	3.162.572	3.171.992
Ekspor neto c)	-318.743	-950.520	-1.643.195	-1.722.267

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara
c) ekspor dan antar pulau keluar dikurangi impor dan antar pulau masuk

Jika diamati lebih jauh, ternyata peran perdagangan antar pulau lebih besar dibandingkan dengan peran perdagangan luar negerinya (lihat Tabel 3.10). Dalam kurun 1997-2000 peranan perdagangan antar pulau keluar berkisar antara 92 sampai 97,38 persen terhadap total ekspor dan antar pulau keluar. Begitu juga peranan perdagangan antar pulau masuk memiliki peranan yang cukup besar terhadap total impor dan antar pulau masuk. Pada tahun 1997 peran perdagangan antar pulau masuk mencapai 99,34 persen. Akan tetapi proporsi tersebut langsung melorot menjadi 83,78 persen pada tahun 1998 dan menurun lagi secara tajam menjadi hanya 68,12 persen pada tahun 1999. Namun pada tahun 2000 peran tersebut kembali meningkat tajam menjadi 89,72 persen. Peningkatan proporsi impor pada tahun 1998 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya permintaan konsumsi orang asing (baik dalam rangka keperluan politik maupun sosial) yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun tersebut.

Tabel 3.10
Komposisi Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Berlaku
Nusa Tenggara Timur

(Persen)				
Rincian	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Ekspor	2,62	8,00	5,94	5,94
b. Antar Pulau Keluar	97,38	92,00	94,06	94,06
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Impor	0,66	16,22	31,88	10,28
b. Antar Pulau Masuk	99,34	83,78	68,12	89,72

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara
c) ekspor dan antar pulau keluar dikurangi impor dan antar pulau masuk

Jika diperhatikan laju pertumbuhannya, tampak bahwa antara impor dan antar pulau masuk memiliki kesamaan pola perkembangan dengan ekspor dan antar pulau keluar (lihat Tabel 3.11). Pada tahun 1997 masing-masing mengalami pertumbuhan cukup tinggi, kemudian menurun pada tahun 1998, meningkat pada tahun 1999, dan kembali menurun pada tahun 2000.

Namun demikian jika dilihat lebih rinci ke masing-masing komponen tampak bahwa masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda. Ekspor pada tahun 1997 menurun tajam sebesar minus 55,30 persen. Pada tahun 1998 nilai ekspor masih mengalami penurunan lagi sebesar minus 12,77 persen, kemudian meningkat sebesar 22,97 persen pada tahun 1999. Pada tahun 2000 ekspor kembali meningkat, tetapi hanya sebesar 0,50 persen. Sementara itu pertumbuhan antar pulau keluar pada tahun 1997 meningkat sebesar 40,76 persen. Pada tahun 1998 nilai antar pulau keluar mengalami penurunan sebesar minus 24,53 persen, kemudian meningkat lagi sebesar 37,12 persen pada tahun 1999. Pada tahun 2000 antar pulau keluar menurun tajam sebesar minus 27,54 persen.

Laju pertumbuhan impor pada tahun 1997 sebesar 51,85 persen. Nilai impor pada tahun 1998 meningkat sangat tajam dan laju pertumbuhannya mencapai 1.221,19 persen. Pada tahun 1999 pun impor masih mengalami pertumbuhan yang

tinggi, yaitu 192,62 persen, sementara laju pertumbuhan antar pulau masuk pada tahun 1997 adalah 13,46 persen. Pada tahun 1998 laju pertumbuhan antar pulau masuk bahkan negatif sebesar minus 34,10 persen, walaupun kemudian meningkat sebesar 6,66 persen pada tahun 1999. Pada tahun 2000 antar pulau masuk menikmati laju pertumbuhan sangat tinggi, yaitu 20,42 persen.

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan Komponen Perdagangan Luar Negeri dan Antar Pulau
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Nusa Tenggara Timur

Rincian	(Persen)			
	1997	1998	1999 ^{a)}	2000 ^{b)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	33,24	-24,22	36,69	-26,78
a. Ekspor	-55,30	-12,77	22,97	0,50
b. Antar Pulau Keluar	40,76	-24,53	37,12	-27,54
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	12,18	-23,51	33,77	-8,57
a. Impor	-51,85	1221,19	192,62	-70,50
b. Antar Pulau Masuk	13,46	-34,10	6,66	20,42
Ekspor neto c)	32,97	20,50	21,88	73,71

Keterangan: a) Angka revisi
b) Angka sementara
c) ekspor dan antar pulau keluar dikurangi impor dan antar pulau masuk

TABEL-TABEL LAMPIRAN

<https://ntt.bp.go.id>

Tabel 1
Penggunaan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur
Tahun 1995-2000

(Ribu Rupiah)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.557.549.092	1.800.489.388	2.234.248.713	3.282.832.090	4.168.033.524	4.941.681.536
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	14.622.382	18.796.505	19.228.407	20.666.629	21.169.057	23.989.690
3. Konsumsi Pemerintah	649.123.803	722.892.696	821.899.876	946.372.850	971.708.046	1.183.686.379
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	713.953.457	867.663.929	817.496.638	1.067.056.542	1.231.646.921	1.419.788.261
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	779.133.823	879.088.400	1.371.238.885	1.132.808.442	1.519.377.313	1.449.725.135
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	1.057.841.466	1.304.243.088	1.689.981.636	2.083.328.435	3.162.572.063	3.171.992.449
7. Perubahan Stok *)	217.589.707	348.156.476	509.264.724	501.419.539	868.360.051	482.573.704
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.874.130.798	3.332.844.306	4.083.395.607	4.867.827.657	5.617.722.849	6.329.452.256
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.343.409.126	1.582.293.626	1.458.224.196	1.440.702.899	1.646.056.991	1.755.019.413
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	13.188.830	14.841.202	15.069.538	14.917.921	15.056.908	15.508.274
3. Konsumsi Pemerintah	569.856.731	591.468.414	626.834.076	658.025.900	750.469.607	789.124.250
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	624.479.569	716.836.861	636.427.583	525.811.429	528.112.121	568.345.669
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	589.801.045	650.122.269	866.250.061	656.442.749	897.307.907	657.053.030
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	793.057.305	953.487.588	1.069.581.398	818.087.001	1.094.315.593	1.000.570.763
7. Perubahan Stok *)	133.797.834	83.459.336	303.103.960	281.091.839	91.524.000	162.411.723
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.481.475.830	2.685.534.120	2.836.328.016	2.758.905.736	2.834.211.941	2.946.891.596

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 3
Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000

(Persen)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Konsumsi Rumah Tangga	115,92	115,60	124,09	146,93	126,96	118,56
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	102,26	128,55	102,30	107,48	102,43	113,32
3. Konsumsi Pemerintah	116,76	111,36	113,70	115,14	102,68	121,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	107,48	121,53	94,22	130,53	115,42	115,28
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	134,73	112,83	155,98	82,61	134,12	95,42
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	119,93	123,29	129,58	123,28	151,80	100,30
7. Perubahan Stok *)	118,43	160,01	146,27	98,46	173,18	55,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	116,92	115,96	122,52	119,21	115,41	112,67
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Konsumsi Rumah Tangga	105,93	117,78	92,16	98,80	114,25	106,62
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	105,81	112,53	101,54	98,99	100,93	103,00
3. Konsumsi Pemerintah	109,18	103,79	105,98	104,98	114,05	105,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,49	114,79	88,78	82,62	100,44	107,62
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	110,83	110,23	133,24	75,78	136,69	73,22
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	102,58	120,23	112,18	76,49	133,77	91,43
7. Perubahan Stok *)	141,18	62,38	363,18	92,74	32,56	177,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	108,94	108,22	105,62	97,27	102,73	103,98

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 4
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000 (1993=100)

(Persen)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Konsumsi Rumah Tangga	134,40	155,36	192,79	283,26	359,65	426,40
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	113,09	145,37	148,71	159,84	163,72	185,54
3. Konsumsi Pemerintah	141,27	157,32	178,87	205,96	211,47	257,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	120,02	145,86	137,43	179,38	207,05	238,68
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	156,06	176,08	274,66	226,90	304,33	290,38
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	154,14	190,04	246,25	303,56	460,82	462,19
7. Perubahan Stok *)	356,86	571,00	835,22	822,36	1.424,16	791,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	136,85	158,70	194,43	231,79	267,49	301,38
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Konsumsi Rumah Tangga	115,92	136,53	125,83	124,31	142,03	151,43
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	102,00	114,78	116,55	115,38	116,45	119,94
3. Konsumsi Pemerintah	124,02	128,72	136,42	143,21	163,33	171,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	104,98	120,51	106,99	88,39	88,78	95,54
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	118,14	130,22	173,51	131,49	179,73	131,61
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	115,56	138,93	155,85	119,20	159,45	145,79
7. Perubahan Stok *)	219,44	136,88	497,11	461,01	150,10	266,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	118,16	127,87	135,05	131,37	134,95	140,32

Keterangan : *) Residual
1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 5
 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
 Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan
 Tahun 1995-2000

(Persen)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	115,94	113,79	153,22	227,86	253,21	281,57
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba	110,87	126,65	127,60	138,54	140,59	154,69
3. Konsumsi Pemerintah	113,91	122,22	131,12	143,82	129,48	150,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	114,33	121,04	128,45	202,94	233,22	249,81
5. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	132,10	135,22	158,30	172,57	169,33	220,64
6. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	133,39	136,79	158,00	254,66	289,00	317,02
7. Perubahan Stok *)	162,63	417,16	168,02	178,38	948,78	297,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	115,82	124,10	143,97	176,44	198,21	214,78

Keterangan : *) Residual
 1) Angka Revisi
 2) Angka Sementara

Tabel 6
Konsumsi Rumah Tangga
Nusa Tenggara Timur
Tahun 1995-2000

(Ribu Rupiah)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Kelompok Makanan	1.079.394.968	1.200.094.524	1.703.782.593	2.645.334.730	2.930.220.557	3.558.751.725
2. Kelompok Bukan Makanan	478.154.124	600.394.864	530.466.120	637.497.360	1.237.812.967	1.382.929.811
JUMLAH	1.557.549.092	1.800.489.388	2.234.248.713	3.282.832.090	4.168.033.524	4.941.681.536
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Kelompok Makanan	913.425.546	1.076.317.959	1.032.767.519	1.020.572.167	1.026.347.271	1.091.823.057
2. Kelompok Bukan Makanan	429.983.580	505.975.667	425.456.677	420.130.732	619.709.720	663.196.356
JUMLAH	1.343.409.126	1.582.293.626	1.458.224.196	1.440.702.899	1.646.056.991	1.755.019.413

Keterangan. 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 7
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
Nusa Tenggara Timur
Tahun 1995-2000

(Ribu Rupiah)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Lembaga Keagamaan	14.021.050	18.139.892	18.535.979	19.940.118	20.408.128	23.127.372
2. Lembaga Sosial Lainnya	601.332	656.613	692.428	726.511	760.929	862.318
JUMLAH	14.622.382	18.796.505	19.228.407	20.666.629	21.169.057	23.989.690
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Lembaga Keagamaan	12.622.105	14.257.012	14.484.376	14.299.550	14.428.258	14.860.778
2. Lembaga Sosial Lainnya	566.725	584.190	585.162	618.371	628.650	647.496
JUMLAH	13.188.830	14.841.202	15.069.538	14.917.921	15.056.908	15.508.274

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 8
Konsumsi Pemerintah Nusa Tenggara Timur
Tahun 1995-2000

(Ribu Rupiah)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Belanja Pegawai Bruto	536.647.011	597.344.356	668.895.608	763.664.014	783.021.556	963.121.992
2. Belanja Barang	53.780.191	59.135.468	71.840.609	82.491.316	84.018.430	104.272.746
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	19.502.495	21.775.397	24.320.226	27.956.464	28.749.001	31.704.452
4. Biaya Perjalanan Dinas	16.545.781	19.561.567	25.806.210	27.211.636	27.401.948	26.314.479
5. Belanja Rutin Lainnya	22.648.325	25.075.908	31.037.223	45.049.420	48.517.111	58.272.710
JUMLAH	649.123.803	722.892.696	821.899.876	946.372.850	971.708.046	1.183.686.379
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Belanja Pegawai Bruto	471.114.925	488.745.178	508.124.892	530.985.964	604.743.247	642.081.326
2. Belanja Barang	47.212.879	48.384.444	55.737.923	57.357.333	64.889.118	69.515.164
3. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin	17.120.968	17.816.558	18.868.978	19.438.509	22.203.430	21.136.301
4. Biaya Perjalanan Dinas	14.525.310	16.005.209	20.021.887	18.920.620	21.163.074	17.542.986
5. Belanja Rutin Lainnya	19.882.649	20.517.025	24.080.396	31.323.474	37.470.738	38.848.473
JUMLAH	569.856.731	591.468.414	626.834.076	658.025.900	750.469.607	789.124.250

Keterangan 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 9
Pembentukan Modal tetap Bruto
Nusa Tenggara Timur
Tahun 1995-2000

(Ribu Rupiah)

Asal Barang	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	84.806.296	137.160.218	64.460.047	148.250.049	182.930.832	183.950.576
2. Domestik	629.147.161	730.503.711	753.036.591	918.806.493	1.048.746.089	1.235.837.585
a. Industri	5.168.470	6.689.480	8.720.168	9.442.486	10.320.326	10.665.354
b. Konstruksi	612.122.203	711.223.468	731.176.975	896.737.020	1.025.316.737	1.204.533.909
c. Pemerintah*)	11.856.488	12.590.763	13.139.448	12.626.987	13.079.026	20.638.322
JUMLAH	713.953.457	867.663.929	817.496.638	1.067.056.542	1.231.646.921	1.419.788.261
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Impor dan Antar Pulau Masuk	69.581.653	106.123.908	45.041.274	54.062.542	63.489.887	63.626.239
2. Domestik	554.897.916	610.712.953	591.386.309	471.748.887	465.050.133	504.719.430
a. Industri	4.727.469	5.216.071	6.378.547	6.428.036	5.342.466	8.363.672
b. Konstruksi	541.365.705	595.129.229	574.592.028	456.271.126	449.599.885	480.171.378
c. Pemerintah*)	8.804.742	10.367.653	10.415.734	9.049.725	10.107.782	16.184.380
JUMLAH	624.479.569	716.836.861	636.427.583	525.811.429	529.540.020	568.345.669

Keterangan: *) tidak termasuk pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, konstruksi dan industri yang dikelola pemerintah

1) Angka Revisi

2) Angka Sementara

Tabel 10
Ekspor Neto Nusa Tenggara Timur
Tahun 1995-2000

(Ribu Rupiah)

Rincian	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	779.133.823	879.088.400	1.371.238.885	1.132.808.442	1.519.377.313	1.449.725.135
a. Ekspor	36.844.631	56.782.214	35.989.402	90.568.978	90.230.652	86.094.246
b. Antar Pulau Keluar	742.289.192	822.306.186	1.335.249.483	1.042.239.464	1.429.146.661	1.363.630.889
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	1.057.841.466	1.304.243.088	1.689.981.636	2.083.328.435	3.162.572.063	3.171.992.449
a. Impor	8.584.000	21.585.000	11.119.715	337.903.707	1.008.290.904	326.111.561
b. Antar Pulau Masuk	1.049.257.466	1.282.658.088	1.678.861.921	1.745.424.728	2.154.281.159	2.845.880.888
EKSPOR NETO¹⁾	-278.707.643	-425.154.688	-318.742.751	-950.519.993	-1.643.194.750	-1.722.267.310
II. ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993						
1. Ekspor dan Antar Pulau Keluar	589.801.045	650.122.269	866.250.061	656.442.749	897.307.907	657.053.030
a. Ekspor	34.320.096	50.861.093	22.735.515	19.831.562	24.386.663	24.509.668
b. Antar Pulau Keluar	555.480.949	599.261.176	843.514.546	636.611.187	872.921.244	632.543.362
2. Impor dan Antar Pulau Masuk (-)	793.057.305	953.487.588	1.069.581.398	818.087.001	1.094.315.593	1.000.570.763
a. Impor	7.861.267	18.741.860	9.024.278	119.227.870	348.889.586	102.905.690
b. Antar Pulau Masuk	785.196.038	934.745.728	1.060.557.120	698.859.131	745.426.007	897.665.073
EKSPOR NETO¹⁾	-203.256.260	-303.365.319	-203.331.337	-161.644.252	-197.007.686	-343.517.733

Keterangan . *) Ekspor dan antar pulau keluar dikurangi impor dan antar pulau masuk

1) Angka revisi

2) Angka sementara

Tabel 11
Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Yang Berlaku
Tahun 1995-2000

(Milyar Rupiah)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	279.876,4	332.094,4	387.170,7	647.823,6	813.183,3	867.997,1
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	35.584,2	40.299,2	42.952,0	54.415,9	72.631,3	90.779,7
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129.217,5	157.652,7	177.686,1	243.043,4	240.322,2	313.915,2
4. Perubahan Stok *)	15.900,4	5.800,4	21.615,1	-82.716,1	-105.063,3	-83.319,2
5. Ekspor Barang dan Jasa	119.592,5	137.533,3	174.871,3	506.244,8	390.560,1	497.518,9
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	125.656,9	140.812,0	176.599,8	413.058,1	301.654,1	396.207,5
7. Produk Domestik Bruto	454.514,1	532.568,0	627.695,4	955.753,5	1.109.979,5	1.290.684,2
8. Pendapatan Netto terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi	-13.366,1	-14.272,2	-18.355,0	-53.893,7	-78.896,7	-89.256,4
9. Produk Nasional Bruto	441.148,0	518.295,8	609.340,4	901.859,8	1.031.082,8	1.201.427,8
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Netto	27.486,5	28.918,9	37.828,7	6.480,5	17.950,1	-37.820,3
11. Dikurangi Penyusutan	22.725,7	26.628,4	31.384,8	47.787,7	55.499,0	64.534,2
PENDAPATAN NASIONAL	390.935,8	462.748,5	540.126,9	847.591,6	957.633,7	1.174.713,9

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 12
Penggunaan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 1995-2000

(Milyar Rupiah)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	234.245,4	257.016,2	277.116,1	260.022,7	272.070,2	281.957,4
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	30.850,6	31.681,4	31.700,8	26.827,9	27.014,3	28.767,8
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	112.386,4	128.698,6	139.725,5	93.604,7	75.467,9	88.984,5
4. Perubahan Stok *)	15.852,7	5.873,1	3.341,7	-6.386,9	-8.571,9	-16.138,3
5. Ekspor Barang dan Jasa	104.491,8	112.391,4	121.157,9	134.707,2	92.123,6	106.917,5
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	114.034,6	121.862,8	139.796,1	132.400,7	78.546,4	92.822,6
7. Produk Domestik Bruto	383.792,3	413.797,9	433.245,9	376.374,9	379.557,7	397.666,3
8. Pendapatan Netto terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi	-11.923,8	-12.486,8	-15.462,9	-27.965,4	-22.145,1	-24.592,7
9. Produk Nasional Bruto	371.868,5	401.311,1	417.783,0	348.409,5	357.412,6	373.073,6
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Netto	23.209,6	22.469,6	26.100,2	1.858,9	6.112,6	-11.666,2
11. Dikurangi Penyusutan	19.189,6	20.689,9	21.662,3	18.818,7	18.977,9	19.883,3
PENDAPATAN NASIONAL	329.469,2	358.151,6	370.020,5	327.731,9	332.322,1	364.856,5

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 13
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000

(Persen)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	61,58	62,36	61,68	67,78	73,26	67,25
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,83	7,57	6,84	5,69	6,54	7,03
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,43	29,60	28,31	25,43	21,65	24,32
4. Perubahan Stok *)	3,50	1,09	3,44	-8,65	-9,47	-6,46
5. Ekspor Barang dan Jasa	26,31	25,82	27,86	52,97	35,19	38,55
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	27,65	26,44	28,13	43,22	27,18	30,70
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 14
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000

(Persen)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	61,03	62,11	63,96	69,09	71,68	70,90
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,04	7,55	7,32	7,13	7,12	7,23
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,28	31,10	32,25	24,87	19,88	22,38
4. Perubahan Stok *)	4,13	1,42	0,77	-1,70	-2,26	-4,06
5. Ekspor Barang dan Jasa	27,23	27,16	27,97	35,82	24,27	26,89
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29,71	29,45	32,27	35,18	20,69	23,34
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

Tabel 15
Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000

(Persen)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	145,04	172,11	200,65	335,73	421,43	449,84
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	119,58	135,43	144,34	182,87	244,08	305,07
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	149,10	181,91	205,02	280,43	277,29	362,21
4. Ekspor Barang dan Jasa	135,54	155,88	198,20	573,77	442,66	563,88
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	160,31	179,65	225,30	526,97	384,85	505,48
PRODUK DOMESTIK BRUTO	137,83	161,49	190,34	289,82	336,59	391,38

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

<https://ntt.bps.go.id>



Tabel 16
Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000

(Persen)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	121,40	133,20	143,61	134,76	141,00	146,12
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	103,68	106,47	106,53	90,16	90,78	96,68
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129,68	148,50	161,22	108,00	87,08	102,67
4. Ekspor Barang dan Jasa	118,43	127,38	137,32	152,68	104,41	121,18
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	145,48	155,47	178,35	168,92	100,21	118,42
PRODUK DOMESTIK BRUTO	116,38	125,48	131,38	114,13	115,10	120,59

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 17
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Yang Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000

(Persen)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	22,69	18,66	16,58	67,32	25,53	6,74
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,74	13,25	6,58	26,69	33,47	24,99
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,62	22,01	12,71	36,78	-1,12	30,62
4. Ekspor Barang dan Jasa	18,02	15,00	27,15	189,50	-22,85	27,39
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	29,61	12,06	25,42	133,89	-26,97	31,34
PRODUK DOMESTIK BRUTO	18,91	17,17	17,86	52,26	16,14	16,28

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

<https://ntt.bps.go.id>

Tabel 18
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Penggunaan
Tahun 1995-2000

(Persen)

Jenis Penggunaan	1995	1996	1997	1998	1999 ¹⁾	2000 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	12,58	9,72	7,82	-6,17	4,63	3,63
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,34	2,69	0,06	-15,37	0,69	6,49
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,99	14,51	8,57	-33,01	-19,38	17,91
4. Ekspor Barang dan Jasa	7,72	7,56	7,80	11,18	-31,61	16,06
5. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	20,94	6,86	14,72	-5,29	-40,68	18,18
PRODUK DOMESTIK BRUTO	8,22	7,82	4,70	-13,13	0,85	4,77

Keterangan: 1) Angka Revisi
2) Angka Sementara

DAFTAR PUSTAKA

- Beckerman, W. (1968) *An introduction to national income analysis*, Weidenfeld and Nicholson
- BPS (2000) *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kotamadya: Tata cara Penghitungan Menurut Penggunaan*, Buku 3
- BPS (2000) *Laporan Perekonomian Indonesia 2000*
- BPS NTT (2000) *Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Timur Menurut Penggunaan 1994-1999*
- Glasson, J. (1990) *Pengantar Perencanaan Regional, diterjemahkan oleh Paul Sitohang*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Marsisno, W. (2000) "*PDRB Menurut Penggunaan dan Manfaatnya dalam Perencanaan Pembangunan*", naskah bahan diskusi intern, tidak dipublikasikan.
- Partadiredja, A. (1993) *Perhitungan Pendapatan Nasional*, cetakan ke delapan, LP3ES.
- Prayitno, H. Santosa, B. (1996) *Ekonomi Pembangunan*, ghalia Indonesia
- Todaro, M. P. (1986) *Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode*, dialihbahasakan oleh Siswo Suyanto, CV Inter Media.

BPS PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<https://ntt.bps.go.id>

<https://ntt.bps.go.id>

BPS

Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan R. Suprpto No. 5, Kupang 85111
Telp. (0380) 826289, (0380) 821755, Faks. (0380) 833124
e-mail: bps5300@kupang.wasantara.net.id